BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat, maka peneliti mengemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang berlangsung belum berjalan secara efektif dalam implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat. Proses penyampaian informasi antar aparatur maupun dengan masyarakat pemohon ijin melalui perangkat media komputer kurang efektif, dikarenakan tidak semua aparatur maupun masyarakat memahaminya. Kejelasan penyampaian informasi antar aparatur dengan masyarakat cukup efektif, dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggung jawabkan. Konsistensi, kebijakan yang dibuat sudah konsisten dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
2. Sumber daya yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP Pada BPPT Provinsi Jawa Barat belum cukup berkualitas. Sumber daya manusia yang tersedia belum banyak yang dapat menguasai komputerisasi dan tidak adanya staf khusus komputerisasi di Bidang Perhubungan untuk

menunjang keberhasilan pelaksanaan perekapan data pemohon ijin. Sumber daya anggaran, yang tersedia sudah mencukupi untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan pelaksanaan perijinan tersebut. Sumber daya informasi sudah jelas dalam pelaksanaannya. Sumber daya peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaannya belum mencukupi khususnya untuk penambahan mesin printer untuk mencetak Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP.

3. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat sudah dikatakan baik dan dapat dilihat dari: pemahaman dan pendalaman, pemahaman dan pendalaman aparatur di bagian Bidang Perhubungan yang tinggi untuk menunjang terlaksananya implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP. Staffing birokrasi atau pengangkatan birokrat sudah cukup baik dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang wajib diikuti oleh aparatur. Kewenangan di BPPT Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan tugas seksi-seksi bagian masing-masing dan setiap seksi-seksi bertanggung jawab atas tugasnya dan telah dilaksanakan dengan cukup baik.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik dengan adanya penghargaan ISO dan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dijalankan oleh aparatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab

terjadi dan sesuai dengan bagiannya masing-masing akan memperlancar keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah peneliti kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan oleh aparatur BPPT Provinsi Jawa Barat dalam kebijakan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat. Saran-saran tersebut antara lain:

1. BPPT Provinsi Jawa Barat harus lebih meningkatkan lagi kinerja aparaturnya di dalam proses komunikasi antara aparatur maupun aparatur dengan masyarakat supaya pelaksanaan implementasi kebijakan pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat dapat berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Peningkatan komunikasi tersebut bisa dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bersama diluar jam kerja seperti liburan bersama demi menjalin hubungan baik antar aparatur.
2. Sumber daya yang ada di BPPT Provinsi Jawa Barat harus dilaksanakan secara maksimal. Terutama untuk sumber daya manusia yang memahami komputer bagian *software* maupun *hardware* dan memahami mengenai ijin transportasi di Bidang Perhubungan harus ditambah dikarenakan banyaknya pemohon ijin di seluruh Provinsi Jawa Barat yang membuat Surat Keputusan Ijin Trayek

Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat. Sumber daya fasilitas harus ditingkatkan demi kenyamanan staf yang bekerja di Bagian Perhubungan dengan ditatanya lokasi kerja yang nyaman.

3. Sikap para aparaturnya harus dipertahankan dengan cara meningkatkan pemahaman dan pendalaman antar aparatur maupun dengan masyarakat pemohon ijin dan meningkatkan intensitas yang lebih tinggi untuk terlaksananya keberhasilan implementasi kebijakan tentang pembuatan Surat Keputusan Ijin Trayek Dan Kartu Pengawasan AKDP di BPPT Provinsi Jawa Barat.
4. Setelah mendapatkan penghargaan ISO mekanisme struktur birokrasi di Bagian Perhubungan harus dipertahankan dengan melekukan prosedur yang telah ditentukan oleh BPPT Provinsi Jawa Barat. Dalam pembagian tanggung jawab harus adanya kejelasan secara tertulis agar pekerjaan lebih mudah dikerjakan.